

STRATEGI PEMECAHAN PENGANGGURAN DI TENGAH KRISIS GLOBAL

Oleh:

Dra. Dwi Prawani Sri Rejeki, MSi.

Drs. R. Djoko Hartono, MM.

Dosen Pada STIE Semarang

Abstrak:

Diperkirakan pengangguran pada tahun 2009 akan meningkat tajam semng belum pulihnya krisis global sejak tahun 2008, dan bahkan diprediksikan jumlahnya jauh lebih besar daripada yang terjadi tahun 2008. Terlebih di kalangan dunia usaha Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri masih menyisakan persoalan. Tulisan berikut ini akan mengupas tentang pengangguran sebagai dampak dari krisis global dan strategi pemecahannya.

Kata-kata kunci: Strategi pemecahan, Pengangguran, Krisis Global.

A. Pendahuluan

Belum berakhirnya krisis global yang terjadi pada tahun 2008 dan masih dipersoalkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 (empat) Menteri, yaitu Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan yang bertajuk tentang pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi pereknomian global menjadikan kondisi ketenagakerjaan Indonesia mengalami tekanan secara beruntun.

Di satu sisi, sebagaimana kita ketahui bahwa krisis global yang dimulai sejak tahun 2008, diyakini pada tahun 2009 masih menggelayuti pereknomian Indonesia dan bahkan dampaknya diprediksi akan lebih hebat. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan lembaga keuangan internasional IMF dan Bank Dunia yang memperkirakan bahwa pereknomian global akan berada pada jurang resesi.

Bahkan prediksi mereka selalu direvisi setiap dua bulan dan selalu

lebih pesimistik dari angka sebelumnya. Beberapa ekonom seperti Bradford DeLong memperkirakan bahwa negara-negara maju akan mengalami depresi cukup parah. Meski krisis tahun 2008 berbeda dengan krisis pada tahun 1998 lalu, namun dampak yang harus mendapatkan perhatian agar tidak terjadi instabilitas yaitu terhadap ancaman terjadinya pengangguran akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang bersumber dari bangkrutnya atau ambruknya perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor. Diperkirakan akan ada satu juta pengangguran baru yang tercipta oleh krisis, dengan perkiraan, 300 ribu diantaranya berasal dari TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang dipulangkan dari Malaysia, Hongkong, Taiwan, Korea dan Singapura. Lima Negara tersebut merupakan Negara yang diperkirakan paling parah dilanda krisis (Suara Merdeka, 23 Desember 2008).

Di sisi lain, SKB empat menteri yang sampai saat iru masih

dipersoalkan oleh APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Serikat Pekerja diperkirakan juga akan berdampak pada PHK meskipun berskala kecil. Di dalam SKB tersebut telah diatur dan ditetapkan, bahwa kisaran upah minimum diserahkan langsung antara pengusaha dan pekerja. Dalam hal ini pemerintah tidak ikut campur tangan di dalam menentukan besaran upah minimum pekerja. Jika sebelumnya di dalam menentukan besaran upah minimum ditetapkan oleh Tripartit yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan pekerja, Maka dengan berlakunya SKB tersebut, upah hanya ditentukan oleh Bipartit yaitu hanya antara pengusaha dengan pekerja.

Kondisi inilah yang ditakuti oleh para pekerja, karena dalam penentuan upah oleh Tripartit saja masih dilanggar pengusaha, apalagi penetapan upah hanya ditentukan oleh Bipartit. Padahal jika para pekerja menolak maka ancamannya adalah PHK. Dan PHK jelas akan menambah daftar jumlah pengangguran terbuka di Indonesia.

Angka perkiraan penganggur sebesar satu juta penganggur yang tercipta akibat krisis global tersebut belum termasuk penganggur dari sumbangsih perguruan tinggi atau pengangguran intelektual yang berjumlah 400 ribu lebih penganggur atau sekitar 4,86%. Meskipun secara prosentasi angka tersebut tergolong kecil namun bila dilihat dari jumlah lulusan per tahun yang dihasilkan 81 PTN dan 2236 PTS seluruh Indonesia pada tahun 2006 sebesar 600 ribu, maka angka tersebut terbilang sangat besar (Fauzan, 2005:122).

Padahal dengan angka pertumbuhan 6,2% belumlah dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada Indonesia. Karena setiap pertumbuhan 1%, tenaga kerja yang terserap hanya berkisar 300 - 400 ribu orang. Artinya, pertumbuhan 6,2% hanya mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi 1,8 - 2 juta orang penganggur. Oleh karena itu pertumbuhan harus lebih tinggi lagi dari 6,2% (Suara Merdeka, 26 Januari 2006).

B. Permasalahan

Dengan kondisi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran.
2. Bagaimana implikasi pengangguran terhadap pembangunan nasional serta strategi apa yang akan diterapkan untuk memecahkannya di tengah krisis global.

C. Pembahasan

Bagaimana sifat dan bentuknya, apakah terbuka ataupun tersembunyi, pengangguran merupakan beban, baik bagi pemerintah maupun si penganggur itu sendiri. Salah satu faktor yang turut memberikan sumbangsih terjadinya pengangguran antara lain yang utama adalah terjadinya krisis global dengan ditandai keberangkatan perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor dan berdampak pada PHK serta adanya daya tarik, bahwa bekerja di kota lebih menjanjikan serta menjamm masa depan

kehidupan lebih baik dibandingkan apabila tetap bertahan di desanya.

Ledakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari pekerjaan dengan tidak diimbangi ketrampilan memadai, menjadikan kota sebagai tumpukan pengangguran, yang pada akhirnya memunculkan daerah 'slum' atau daerah kumuh(dengan mendirikan emplek-emplek atau bangunan liar di daerah hijauJ larangan, bahkan ada yang sudah sampai menggerus sebagian badan sungai).

Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Konsep angkatan kerja sebagaimana yang disarankan oleh ILO (International Labor Organization) membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Terkait dengan konsep tersebut di atas, rincian atas definisi dimaksud, sebagaimana akan dipaparkan di bawah ini :

- a. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
- b. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- c. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih)

yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

- d. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usahakegiatan ekonomi.
- e. Punya pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja, adalah keadaan seseorang yang memiliki pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja, karena berbagai sebab, seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya (Sakernas 2003).

Di Indonesia dan negara sedang berkembang lainnya, tidak saja menghadapi masalah pengangguran terbuka di bidang ketenagakerjaan, tetapi menghadapi pula masalah setengah penganggur. Dari kedua masalah ketenagakerjaan tersebut, masalah pengangguran terbuka tidaklah lebih serius bila dibandingkan dengan masalah setengah penganggur. Berdasarkan hal itu, perlu dipahami terlebih dahulu konsep pengangguran terbuka dan setengah penganggur.

Konsep pengangguran terbuka dan konsep setengah penganggur merujuk pada dua situasi yang berbeda. Perbedaan antara keduanya tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Konsep pengangguran terbuka merujuk pada situasi / keadaan dimana

seseorang menghadapi ketiadaan kesempatan kerja.

b. Konsep setengah penganggur merujuk pada situasi di mana pekerjaan yang dilakukan seseorang, dengan memperhatikan ketrampilan dan pengalaman kerja orang bersangkutan, tidak memenuhi aturan-aturan atau norma-norma pekerjaan yang telah ditetapkan.

Dari kedua konsep tersebut, terungkap bahwa pengangguran terbuka merupakan keadaan seseorang mengalami hambatan di dalam usahanya mendapatkan pekerjaan. Lebih lanjut berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkannya, pengangguran terbuka dapat dikelompokkan menjadi 3 diantaranya :

a. **Pengangguran konjungtur**, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan produksinya. Dalam pelaksanaannya, hal itu berarti jam kerja dikurangi, sebagian mesin produksi tidak dipakai dan sebagian tenaga kerja dihentikan. Dengan demikian kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran.

b. **Pengangguran struktural**, diasumsikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi selalu diikuti oleh perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi. Peranan perekonomian dalam jangka panjang, misalnya

akan meningkatkan peranan sektor industri pengolahan dan mengurangi kegiatan pertambangan dan pertanian. Juga industri-industri rumah tangga serta industri kecil akan mengalami kemunduran dan digantikan oleh kegiatan industri yang menghasilkan barang yang sarna, tetapi memakai peralatan lebih modem. Perubahan struktur dan kegiatan ekonomi sebagai akibat perkembangan ekonomi dapat menimbulkan pengangguran yang dinamakan pengangguran struktural.

Ada dua kemungkinan yang menyebabkan pengangguran struktural yaitu sebagai akibat dari kemerosotan permintaan dan sebagai akibat semakin modemya teknik memproduksi

c. **Pengangguran normal**, kondisi ini terjadi bukanlah sebagai akibat dari ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan. Ini terjadi sebagai akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik. Apabila perekonomian mencapai masa *bum* (kemakmuran) dan tingkat pengangguran adalah sangat rendah, para pengusaha akan menghadapi kesulitan mendapatkan pekerja baru. Dalam situasi seperti itu, segolongan tenaga kerja akan meninggalkan kerjanya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih baik masa depannya serta memberikan pendapatan yang lebih tinggi (Sukimo, 1997:294),.

Sedangkan di sisi lain, setengah penganggur merupakan keadaan seseorang yang telah bekerja, tetapi

mengalami ketidakpuasan atas pekerjaan yang dilakukannya. Karena unsur ketidakpuasan sebagaimana tercermin dalam konsep setengah penganggur, maka konsep setengah penganggur mengandung pengertian cukup luas dan lebih lanjut dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. **Setengah penganggur kentara**, yang mencerminkan adanya ketidakcukupan dalam volume pekerjaan dan,
- b. **Setengah penganggur tidak kentara**, yang mencerminkan adanya penempatan sumber-sumber daya manusia atau adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dan faktor-faktor produksi. Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan, ketrampilan yang kurang dimanfaatkan dan rendahnya tingkat produktivitas.

Agar pengertian konsep pengangguran mudah dipahami, sehingga memudahkan pula cara mengukunya, maka perlu dilakukan operasionalisasi terhadap konsep tersebut. Untuk itu ILO telah menyusun definisi internasional tentang penganggur dan setengah penganggur kentara. Definisi tentang penganggur disusun berdasarkan tiga kriteria yaitu (1) tidak bekerja, (2) bersedia untuk bekerja dan (3) sedang mencari pekerjaan. Dengan demikian penganggur didefinisikan sebagai seorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan. Orang yang tercakup dalam definisi ini disebut sebagai penganggur terbuka atau penganggur penuh. Sedangkan batasan setengah

penganggur kentara disusun juga berdasarkan tiga kriteria, yaitu (1) bekerja kurang dari jam kerja normal, (2) melakukan pekerjaan secara terpaksa atau (3) masih mencari pekerjaan lain atau bersedia menerima pekerjaan lain tambahan.

Lebih lanjut berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakemas) Badan Pusat Statistik mendefinisikan penganggur terbuka atas 4 kriteria, antara lain :

- a. Mereka yang mencari pekerjaan
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Dalam kriteria tersebut, istilah mengenai bersedia menerima pekerjaan tidak dicantumkan, karena telah tersirat bahwa seseorang yang sedang mencari pekerjaan adalah orang yang bersedia menerima pekerjaan.

Sedangkan tentang batasan setengah penganggur, BPS menerima konsep baku ILO, namun dengan menghilangkan kriteria keterpaksaan, karena kriteria ini telah tercermin dari usaha untuk mencari pekerjaan lain atau menerima pekerjaan selain yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, konsep setengah penganggur BPS dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. **Setengah penganggur terpaksa**, adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

- b. Setengah penganggur sukarela, adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan.

Istilah lain dari konsep pengangguran yang sering dijumpai di negara sedang berkembang, antara lain:

- a. Pengangguran tersembunyi, yaitu apabila dalam suatu kegiatan perekonomian, jumlah tenaga kerja sangat berlebihan, maka pengangguran tersembunyi dapat berlaku. Kelebihan tenaga kerja dan pengangguran tersembunyi di sektor pertanian banyak berlaku di negara-negara sedang berkembang.
- b. Pengangguran musiman, merupakan pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun. Biasanya pengangguran seperti ini berlaku pada waktu di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Di dalam periode tersebut banyak diantara para petani dan tenaga kerja di sektor pertanian tidak melakukan pekerjaan, yang berarti mereka sedang dalam keadaan menganggur. Namun pengangguran itu sifatnya sementara saja dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu.
- c. Setengah menganggur, kondisi ini terjadi sebagai akibat tidak tertampungnya kaum urbanisasi yang berusaha mendapatkan pekerjaan di kota-kota besar. Banyak diantara mereka yang harus menganggur dalam waktu yang lama. Di samping itu ada

pula yang mendapatkan pekerjaan, tetapi jam kerjanya setiap hari/minggu adalah jauh lebih rendah dari jumlah jam kerja yang seharusnya dilakukan seseorang dalam masa tersebut (7 jam sehari atau 40 jam seminggu). Tenaga kerja yang bekerja dalam jumlah jam kerja yang terbatas itu tidak dapat dianggap sebagai sepenuhnya bekerja, Tetapi mereka juga bukanlah penganggur. Oleh sebab itu mereka digolongkan sebagai setengah penganggur, dan banyak dijumpai di sektor informal (Sukimo, Opcit:295).

Berdasarkan definisi dan kriteria tentang pengangguran sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai penganggur apabila mereka termasuk penduduk usia kerja (angkatan kerja) yang tidak bekerja atau tidak memiliki kesempatan untuk bekerja dan sedang mencari pekerjaan untuk periode tertentu. Sedangkan meskipun seseorang telah bekerja, namun pekerjaan yang dilakukan kurang dari 35 jam kerja per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain tetap dikategorikan penganggur setengah terpaksa. Dan apabila mereka bekerja di bawah 35 jam kerja per minggu namun tidak mencari pekerjaan serta tidak bersedia menerima pekerjaan lain, digolongkan ke dalam setengah penganggur sukarela.

Adapun secara mendasar penyebab terjadinya pengangguran adalah karena terjadinya ketidakseimbangan antara faktor-faktor sebagai penyebab terjadinya

pengangguran sebagaimana diketahui secara umum antara lain meliputi:

- a. Rendahnya tingkat pendidikan
- b. Rendahnya ketrampilan dan pengalaman yang dimiliki.
- c. Tidak sebandingnya antara kerja dengan lapangan pekerjaan
- d. Terjadinya krisis ekonomi atau keuangan yang mengakibatkan terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
- e. Faktor-faktor lain (misalnya pilih-pilih pekerjaan)

Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja akan menambah jumlah angkatan kerja secara otomatis. Yang dimaksud angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dengan demikian, jelaslah bahwa mereka yang tergolong penganggur (pencari kerja) tetap digolongkan ke dalam angkatan kerja. Sebaliknya mereka yang bekerjapun sekian persennya juga dapat dikategorikan sebagai setengah penganggur.

Selanjutnya untuk melihat realitas jumlah angka pengangguran berikut implikasinya terhadap pembangunan, berikut ini akan disajikan beberapa data hasil analisis dari Sakemas (Survei Angkatan Kerja Nasional) tahun 2003 terkait dengan persoalan tersebut sebagai berikut:

1. Penduduk usia kerja jumlah penduduk Indonesia berumur 15 tahun ke atas

menurut golongan umur dan pendidikan yang ditamatkan berjumlah 152.649.981 orang, dimana dari jumlah tersebut angka tertinggi diduduki oleh mereka yang menamatkan pendidikan dasar (SD dan SMP) sebesar 90.384.166 orang atau 59,21 %. Dengan melihat hal tersebut di atas, maka sangatlah wajar jika lulusan tingkat pendidikan yang rendah ini memberikan sumbangan cukup signifikan terhadap jumlah angka pengangguran baik terbuka maupun setengah penganggur.

2. Jumlah pengangguran terbuka Dari jumlah penganggur terbuka sebesar 9.531.090 orang, kontributor tertinggi tetap berasal dari mereka yang tamat SD dan SMP yaitu sebesar 4.704.565 orang atau 49,36%. Oleh karena itu apabila salah satu penyebab pengangguran terbuka sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan adalah sangat wajar. Mengingat jumlah lulusan SD dan SMP memberikan sumbangan sangat besar terhadap jumlah pengangguran terbuka.
3. Jumlah setengah pengangguran jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang masuk golongan setengah penganggur adalah sebesar 28.467.106 orang, terdiri dari setengah penganggur sukarela sebesar 16.043.572 atau 56,36% dan setengah pengangguran terpaksa sebesar 12.423.534 orang atau 43,64%. Sumbangan paling besar untuk kedua kategori ini tetap diduduki oleh mereka yang hanya tamat SD dan SMP yaitu sebesar 16.741.753 orang atau 58,81% .

Dari jumlah setengah pengangguran sebesar 28 juta lebih berpotensi memberikan sumbangan terhadap jumlah pengangguran terbuka, mengingat mereka bekerja tidak pada jam kerja normal (bekerja di bawah 35 jam per minggu). Sehingga waktu-waktu jumlah tersebut bisa berkurang dalam waktu relative cepat untuk berpindah menambah jumlah pengangguran terbuka.

Setelah mencermati data-data terkait dengan jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, jumlah pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran, maka selanjutnya akan dilihat apakah situasi krisis global tersebut memiliki implikasi terhadap pembangunan.

Sebagaimana telah dikupas dimuka, bahwa jumlah penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. *Pertama*, dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan *Kedua*, dari segi penawaran bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan, jika penduduk ini memiliki kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan (Irawan, 1988:60). Jadi penambahan penduduk dengan tingkat penghasilan yang rendah akan memiliki implikasi bagi pembangunan.

Berbeda dengan negara maju, bahwa penambahan penduduk yang

pesat justru menyumbang terhadap kenaikan penghasilan riil per kapita. Ini disebabkan karena negara yang sudah maju telah siap dengan tabungan yang akan melayani kebutuhan investasi. Tambahan penduduk justru akan menambah potensi masyarakat untuk menghasilkan dan juga sebagai sumber permintaan yang bam. Sementara bagi negara berkembang keadaannya justru terbalik, yaitu bahwa perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perekonomian dan pembangunan. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka paling tidak akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan kerja.

Adapun akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.

Pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai adalah lebih rendah dari pendapatan nasional potensial. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat yang mungkin dicapainya.

b. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang

Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Dengan demikian

pengangguran yang tinggi mengurangi kemampuan pemerintah menjalankan kegiatan pembangunan.

e. Pengangguran tidak enggalakkan pertumbuhan ekonomi

Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Keadaan ini tidak menggalakkan mereka melakukan investasi di masa datang. Kedua, pengangguran yang diakibatkan kelesuan kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang rendah mengurangi keinginan untuk melakukan investasi. Kedua hal tersebut tidak akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Di samping itu, implikasi lain yang dapat dirasakan dengan ~ya angka pengangguran antara lain :

a. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan

Di negara maju, mereka yang menganggur mendapat tunjangan (bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran, sehingga mereka tidak tergantung pada pihak lain. Sedangkan di negara berkembang, karena tidak ada program tersebut, maka kehidupan penganggur harus dibiayai oleh tabungan masa lalu atau pinjaman/bantuan keluarga dan kawan-kawan. Keadaan ini bisa mengakibatkan pertengkaran

dan kehidupan keluarga tidak harmonis.

b. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan ketrampilan

Pengangguran dalam periode yang lama akan menyebabkan tingkat ketrampilan pekerja menjadi semakin merosot atau bahkan menjadi hilang.

c. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik

Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah. Golongan yang memerintah semakin tidak populer di mata masyarakat. Berbagai tuntutan dan kritik akan dilontarkan kepada pemerintah serta adakalanya disertai demonstrasi dan huru-hara. Kegiatan-kegiatan bersifat kriminal akan meningkat. (Sukimo, Op.cit. hal 297).

Dengan melihat pembahasan sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka strategi berupa langkah-langkah untuk mengatasi atau memecahkan masalah pengangguran di tengah krisis global antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan Diversifikasi

Kebanyakan pelaku pasar masih membidik atau terbatas pada pasar otomotif untuk kawasan Timur Tengah dan Amerika Latin. Sementara produk ekspor yang akan digencarkan adalah komponen suku cadang dan barang jadi otomotif. Jika ekspornya ke kawasan itu ditambah, diharapkan produksi tidak terlalu turun. Di samping

itu diversifikasi lain yang perlu dilakukan adalah untuk jenis produk dari yang harganya tinggi ke produk yang lebih murah. Contoh penggunaan jok mobil dari kulit diganti ke bahan yang lebih murah.

2. Menanamkan jiwa kewirausahaan

Pengangguran yang sedang mengincar ribuan orang sebagai dampak dari krisis global seyogyanya dijadikan campuk bagi anak didik untuk memperbaiki diri. Maka ketika masih di bangku kuliah tidak ada salahnya jika membekali diri dengan berbagai ketrampilan. Sehingga ketika lulus mereka dapat membuka lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan ketrampilan yang diperoleh di bangku kuliah tanpa harus bergantung pada pihak lain.

3. Memberikan stimulus fiskal

Salah satu strategi mengantisipasi munculnya pengangguran sebagai dampak dari krisis global adalah berupa pengucuran stimulus di bidang fiskal. Terkait dengan hal tersebut pemerintah Indonesia telah menggelontorkan stimulus fiskal sebesar 50 triliun guna mencegah meluasnya pengangguran, dengan asumsi "kalau tidak ada stimulus, pertumbuhan Cuma 4,5% dan tingkat pengangguran 9,3%. Kami berusaha tingkatkan pertumbuhan ekonomi 5,5% dengan tingkat pengangguran 7,9%," kata Meneg PPNIBappenas Paskah Suzetta. (Suara Merdeka 7 Januari 2009)

4. Mendorong dan Membuka Kesempatan bagi Investor untuk Menanamkan Modalnya ke Indonesia

Memberi kesempatan kepada para investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia bukan pekerjaan mudah dan ringan, karena para pemodal sering diliputi rasa keragu-raguan oleh karena ketidakstabilan politik, sistem administrasinya dan sistem hukumnya yang mungkin kurang mendukung, sehingga mereka kuatir, apakah modalnya akan dapat mereka peroleh kembali apabila terjadi instabilitas. Terhadap keraguan tersebut, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah antara lain:

- a. Bahwa legitimasi pemerintah yang sedang berkuasa harus berada pada tingkat yang tinggi, karena legitimasi yang tinggi tersebut akan dapat menjamin kontinuitas pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pemerintah harus dapat menciptakan iklim yang dapat merangsang untuk penanaman modal. Artinya bahwa kepada para investor, baik yang riil maupun potensial harus diberi keyakinan bahwa modal yang mereka tanam akan memberikan keuntungan kepada mereka yang wajar sebagaimana halnya apabila modal tersebut ditanam di tempat lain.
- c. Pemerintah perlu memberikan jaminan kepada investor, bahwa dalam hal

terjadinya goncangan politik, maka modal mereka akan dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

- d. Pemerintah harus dapat menunjukkan tentang adanya kesungguhan dalam memperbaiki sistem administrasi, agar supaya dalam hubungannya dengan penanaman modal itu, maka permintaan izin dan lain-lain yang berkaitan pembinaan usaha tidak mengalami perubahan birokrasi yang negatif, akan tetapi harus dapat berjalan lancar dan memuaskan (Siagian, Op.cit, hal 66).

D. Penutup

Sebagai bagian dari tatanan ekonomi dunia, adalah sesuatu yang wajar apabila di belahan dunia lain terjadi krisis khususnya krisis keuangan, maka belahan dunia yang lain akan terkena dampaknya. Tak terkecuali dengan krisis ekonomi keuangan yang awalnya bersumber dari Amerika juga telah melanda Indonesia.

Meskipun berbeda dengan krisis yang pernah terjadi pada tahun 1998,

namun krisis tersebut berdampak pada penciptaan pengangguran yang sangat hebat. Oleh karena itu perlu ditanamkan dalam mindset kita, bahwa walalupun pengangguran dapat ditanggulangi atau dipecahkan, namun akan lebih baik apabila sebelum terjadi atau kalau toh terjadi tidak sampai berdampak pada stabilitas nasional jikalau sejak dini sudah berhasil diantisipasi dengan berbagai strategi dan langkah-langkah konkrit; diantaranya dengan

1. Menanamkan jiwa kewirausahaan
2. Melakukan diversifikasi usaha/pasar
3. Mengucurkan stimulus bidang fiskal
4. Menciptakan investor baru dengan fasilitas dan jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2003. Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Jakarta.
- Fauzan, 2005. Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Pengelolaan PTS, dalam Majalah Ilmiah Kopertis Wil. VI, Volume XV, No. 24.
- Irawan dan Suparmoko, 1988. Ekonomi Pembangunan (Edisi keempat), Liberty, Yogyakarta.
- Siagian, S.P.,1981. Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta .
-, Suara Merdeka tgl. 23 Desember 2008 .
-, Suara Merdeka tgl. 7 Januari 2009.
- Sukimo, Sadono, 1997. Pengantar Teori Makroekonomi (Edisi Kedua), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.